

DEMOKRASI ASIMETRIS DAN SEMANGAT MENJAGA ENTITAS KEBERAGAMAN DI MALUKU

ASYMMETRIC DEMOCRACY AND THE SPIRIT OF MAINTAINING DIVERSE ENTITIES IN MALUKU

Abubakar Solissa

Pascasarjana Universitas Paramadina

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 97, RT.4/RW.4, Mampang Prpt., Kec. Mampang Prpt.,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790

Email : abubakarsolissanew@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Maluku. Dahulu kekuasaan dipusatkan kepada segelintir orang melalui mekanisme pemilihan di DPRD, kini sebaliknya kekuasaan semakin terdesentralisasi, sehingga posisi rakyat sebagai pemegang amanat pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan bagi calon kepala daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dinamika politik di Maluku dengan menggunakan teori demokrasi asimetris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, untuk menganalisis bagaimana semangat *Pela-Gandong* menjadi kunci dalam konsolidasi politik di Maluku. Berdasarkan hasil analisis, Di Provinsi Maluku sendiri, mekanisme demokrasi pada level Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota beririsan dengan semangat *Pela-Gandong* yang merupakan basis politik moral di setiap perhelatan politik di Maluku. Sejak pertama kali diselenggarakan Pilgub langsung tahun 2008 - konfigurasi pasangan calon selalu mempertimbangkan aspek keterwakilan agama (Islam-Kristen) sebagai parameter untuk memutuskan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kata Kunci: Demokrasi Asimetris, Semangat *pela-gandong*, Konsolidasi, Maluku.

ABSTRACT

The direct election of regional heads and deputy regional heads gives blessings to the people of Indonesia, especially the people of Maluku. In the past, power was concentrated in a few people through the election mechanism in the DPRD, now on the contrary, power is increasingly decentralized, so that the position of the people as the holder of the mandate for regional head elections is very much needed for regional head candidates. The purpose of this research is to analyze the political dynamics in Maluku by using asymmetric democracy theory. This study uses descriptive qualitative research methods, to analyze how the Pela-Gandong spirit is the key to political consolidation in Maluku. Based on the results of the analysis, in Maluku Province itself, the democratic mechanism at the level of the election of the Governor and Deputy Governor as well as the Regent and Deputy Regent as well as the Mayor and Deputy Mayor coincides with the spirit of Pela-Gandong which is the basis of moral politics in every political event in Maluku. Since the first direct gubernatorial election was held in 2008 - the configuration of candidate pairs has always taken into account the aspect of religious representation (Islam-Christianity) as a parameter to decide the pairs of candidates for governor and deputy governor.

Keywords : Asymmetric Democracy, The spirit of *Pela-Gandong*, Consolidation, Maluku.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia menjadi titik balik konsolidasi demokrasi yang selama ini terlalu sentralistis. Demokrasi tak langsung dianggap tidak terlalu mewakili aspirasi rakyat karena legitimasi politik sang kepala daerah ditentukan oleh segelintir orang di parlemen. Kondisi inilah yang membuat rakyat dan kepala daerah sangat berjarak. Rakyat tidak punya power apa-apa dalam menentukan kepemimpinan daerah. Kepala daerah juga merasa tidak terlalu punya beban buat rakyat. Justru, partai politik dan DPRD-lah yang ditakuti oleh kepala daerah. Sejak berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah pun dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pilkada yang secara perdana dilakukan pada tahun 2005.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya penyempurnaan regulasi yang mengatur soal tatakelola berpilkada dengan menerbitkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan dimasukkannya pilkada dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007, kemudian berlanjut hingga saat ini.

Salah satu provinsi yang turut mewarnai proses konsolidasi demokrasi langsung di Indonesia adalah Maluku. Provinsi tertua di Republik Indonesia ini melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung pertama kali pada tahun 2008 lalu diikuti oleh beberapa kabupaten/kota yang juga punya agenda pilkada langsung sesuai dengan masa jabatan kepala daerahnya masing-masing. Sebelumnya, dua kabupaten baru di Maluku pada saat itu juga telah melakukan pilkada secara langsung pertama di tahun 2005, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Menariknya, pilkada di Maluku punya keistimewaan tersendiri dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Proses penentuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus menggunakan pendekatan keterwakilan agama. Meskipun dalam undang-undang pilkada tidak

diatur demikian, tapi ada semacam kesadaran yang tumbuh dikalangan elit maupun masyarakat Maluku kalau paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus merepresentasi dua komunitas (Islam-Kristen) yang ada di Maluku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam metode penelitian, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada gejala – gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu masalah dimasyarakat yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dialami di tengah setting alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris (Basrowi & Suwandi, 2008). Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini ingin lebih memahami secara mendalam mengenai pergerakan politik di Maluku yang didukung oleh semangat *Pela-Gandong*.

Selanjutnya, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Menurut Lofland dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Lexy. J. Moleong, penelitian kualitatif sumber utama datanya adalah kata - kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong Lexy J, 2000). Selain itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena - fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dalam mengumpulkan data (J. R. Raco, 2010). Melalui studi pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan merujuk kepada artikel, buku-buku, jurnal, dokumen, berita media yang relevan dari media online. Menurut Patton dalam Moleong, teknik analisis data adalah proses kategori dalam pengurutan data, selanjutnya mengorganisasikan ke dalam suatu pola untuk membuat kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dirasa sesuai

dengan teknik penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini. Data diambil pada bulan Mei 2022 melalui media online dan literatur fisik seperti buku dan jurnal yang terkait dengan wilayah Maluku tentang konsolidasi politik disana. Tulisan ini diinspirasi dari kegiatan pemilu yang sebentar lagi diadakan.

PEMBAHASAN

1. SEJARAH DAN PROSES PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) MALUKU

A. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku 2008

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku secara langsung dilakukan secara perdana pada tahun 2008. Pilgub saat itu diikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan incumbent Karel Albert Ralahalu-Said Assagaff (Rasa), Abdullah Tuasikal-Septinus Hématang (Tulus), Muhammad Abdullah Latuconsina-Eduard Frans (Madu) dan Asis Samual-Lukas Uwuratuw (Asli).

Keempat pasangan calon ini bertarung secara demokratis dalam memperebutkan dukungan pemilih. Pada kompetisi ini, pasangan dengan akronim RASA (Karel Albert Ralahalu-Said Assagaff) keluar sebagai pemenang dengan angka yang signifikan - 61, 81 persen pemilih di Maluku menjatuhkan pilihan kepada pasangan ini berdasarkan hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Diposisi kedua ada pasangan Abdullah Tuasikal-Septinus Hématang (Tulus) 26,04 persen. Masuk tiga besar ada pasangan Asis Samual-Lukas Uwuratuw (Asli) 6'15 persen, dan diposisi terakhir ada pasangan Mohammad Abdullah Latuconsina-Eduard Frans (Madu) yang hanya mendapat dukungan 6,00 persen suara. Menariknya, selain proses pemilihannya berjalan secara adil dan demokratis, tanpa ada turbulensi apapun, penjajakan komunikasi politik pun berjalan dengan baik serta mempertimbangkan aspek politik keterwakilan agama.

Paket pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari empat pasangan yang ada semuanya berasal dari dua agama besar yang ada di Maluku, Islam dan Kristen.

Tradisi politik itu terjadi secara turun-temurun hingga saat ini. Seperti misalnya pasangan Karel Albert Ralahalu-Said Assagaff. Karel adalah seorang tokoh kristen yang berstatus incumbent yang maju kembali sebagai calon gubernur di periode kedua berpasangan dengan wakilnya Said Assagaff yang merupakan seorang muslim sekaligus warga Nahdatul Ulama (NU). Assagaf sebelumnya adalah seorang birokrat tulen yang posisi terakhirnya dalam pemerintahan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemerintahan Provinsi Maluku (Pemrov).

Begitupun Abdullah Tuasikal dan Septinus Hematang. Abdullah adalah seorang tokoh muslim yang saat itu menjabat sebagai Bupati Maluku Tengah (Malteng) yang maju sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan tokoh Kristen bernama Septinus Hematang. Pasangan Mohammad Abdullah Latuconsina dan Eduard Frans pun begitu. Latuconsina adalah seorang muslim yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku yang maju sebagai Calon Gubernur dan berpasangan dengan Eduard Frans yang merupakan tokoh kristen. Hal yang sama juga berlaku pada pasangan Asis Samual-Lukas Uwiratuw. Samual merupakan politisi muslim dengan background pengusaha sukses di Jakarta yang maju sebagai Calon Gubernur berpasangan dengan Lukas Uwuratuw yang merupakan tokoh kristen dari Maluku Tenggara.

B. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2013

Konfigurasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan pertimbangan keterwakilan agama juga berlanjut pada Pilgub 2013. Dimana, pada saat itu ada empat pasangan calon. Pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa (Tulus), pasangan Jacobus PutileihalatArifin Tapi Oyihoe (Bob-Arif), pasangan Abdullah Vanat- Marthin Jonas Maspaitella (Damai) dan pasangan Herman Koedubun-Daud Sangadji (Mandat). Keempat pasangan itu merepresentasikan dua komunitas besar yang ada di Maluku. Abdullah Tuasikal adalah tokoh muslim yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Maluku Tengah (Malteng) yang maju sebagai Calon Gubernur sedangkan Hendrik Lewerissa merupakan politisi kristen yang maju sebagai Calon Wakil Gubernur.

Pada pasangan lain ada nama Jacobus Putileihalat sebagai figur kristen Maluku yang saat itu menjabat sebagai Bupati Seram Bagian Barat (SBB) yang maju sebagai Calon Gubernur, dan Wakil Gubernurnya adalah seorang intelektual muslim dari Universitas Pattimura (Unpatti) bernama Arifin Tapi Oyihoe. Abdullah Vanat dan Martin Jonas Maspaitella pun begitu. Vanat merupakan tokoh muda muslim yang saat itu menjabat sebagai Bupati Seram Bagian Timur (SBT) yang maju sebagai Calon Gubernur dan wakilnya adalah seorang intelektual kristen yang berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM). Dan pasangan yang terakhir adalah Herman Koedubun dan Daud Sangadji. Herman adalah seorang kristiani yang pernah menjabat sebagai Wakajati Maluku yang maju sebagai Calon Gubernur dan wakilnya adalah Daud Sangjadi yang merupakan tokoh muslim Maluku dengan background pengusaha.

Ketatnya persaingan membuat pilgub harus berlanjut dua putaran. Dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak lah yang maju pada putaran kedua. Pasangan Said Assagaff-Zeth Sahubarua keluar sebagai pemenang di putaran pertama. Pasangan ini sukses mendulang suara 194.580. disusul pasangan Abdullah Vanat-Marthin Jonas Maspaitella (Damai) yang berhasil memperoleh dukungan elektoral di angka 192.587 suara. Di Peringkat ketiga diisi oleh pasangan Herman Koedubun-Daud Sangadji (Mandat) dengan perolehan suara 189.071. Disusul pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa (Tulus) 160.963 suara dan peringkat terakhir diisi oleh pasangan Jacobus Putileihalat-Arifin Tapi Oyihoe 116.730 suara.

Pasangan Said Assagaff-Zeth Sahubarua dan Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitella meraih suara terbanyak pertama dan kedua setelah KPU Provinsi Maluku melaksanakan putusan sela Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dalam amar putusan akhir perkara nomor 94/PHPU.D-XI/2013, Kamis (14/11/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusan sela yang ditetapkan pada 30 Juli lalu, MK memerintahkan KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Pada putaran kedua Pilgub Maluku, pasangan Said Assagaff-Zeth Sahubarua (Setia) menang tipis atas pasangan Abdullah Vanat-Martin Jonas Maspaitella (Damai) dengan selisih enam ribu sekian. Pasangan Assagaff-Sahubarua memperoleh dukungan elektoral sebanyak 383.705 suara yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Maluku. Sedangkan Vanat-Maspaitella mendapat dukungan 383.705 suara.

C. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018

Paket konfigurasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 juga masih sama dengan dua pilgub sebelumnya. Dimana, faktor keterwakilan agama masih relevan dan sangat penting bagi setiap kandidat yang ingin maju berkompetisi di pilgub. Pilgub Maluku sendiri diikuti tiga pasangan calon dengan latar belakang beragam. Namun, pilgub kali ini sedikit memberikan kejutan bagi masyarakat Maluku dan juga pegiat demokrasi di Maluku. Pasalnya, incumbent Said Assagaff tumbang oleh penantang Irjen Pol Murad Ismail lewat sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis.

Tiga pasangan tersebut diantaranya; pasangan Said Assagaff-Andreas Rentanubun (Santun), pasangan Irjen Pol Murad Ismail-Barnabas Orno (Baileo) dan pasangan Herman Koedubun Abdullah Vanat (Hebat). Ketiga pasangan tersebut juga merepresentasikan dua komunitas besar di Maluku - Islam dan Kristen. Said Assagaf adalah tokoh muslim yang berstatus incumbent yang maju kembali sebagai Calon Gubernur di periode kedua. Selain itu, Assagaff juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Sedangkan Andreas Rentanubun merupakan seorang kristen katolik yang masih menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara.

Pada pasangan berikutnya ada nama Irjen Pol Murad Ismail sebagai figur muslim yang kiprahnya di kepolisian terbilang cemerlang. Murad pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku dan purna tugas sebagai Kakor Brimob di Mabes Polri dengan dua bintang dipundaknya. Murad memilih maju sebagai Calon Gubernur Maluku bersama dengan Baranabas Orno sebagai Calon Wakil Gubernurnya. Orno adalah tokoh kristen protestan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya (MBD).

Sedangkan pasangan terakhir adalah Herman Koedubun dan Abdullah Vanat. Herman merupakan tokoh kristen protestan yang pernah menjabat sebagai mantan Kajati Gorontalo. Herman pernah bertarung di Pilgub Maluku 2013 tapi kemudian kalah. Selain itu, Ia juga sempat menjabat Bupati Maluku Tenggara selama satu periode. Herman Koedubun didampingi Abdullah Vanat sebagai Calon Wakil Gubernur. Vanat adalah tokoh Islam yang pernah memimpin Seram Bagian Timur (SBT) dua periode. Di Pilgub 2013, Abdullah Vanat sempat menjadi kandidat terkuat yang mampu bertarung sampai di putaran kedua meskipun kalah dari Said Assagaff.

Pada kompetisi ini, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno (Baileo) keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 328.982, di peringkat kedua pasangan incumbent Said Assagaff-Andreas Rentanubun dengan jumlah suara 251.036. Dan di posisi terakhir ada pasangan Herman Koedubun-Abdullah Vanat yang hanya mampu mendulang 225.636 suara. Dengan peta elektoral diatas, maka pasangan nomor urut dua, Murad Ismail-Barnabas Orno lah yang keluar sebagai pemenang. Keduanya pun resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024.

2. BUDAYA *PELA-GANDONG* SEBAGAI BASIS KONSOLIDASI BAIK PADA LEVEL KANDIDASI MAUPUN KONTESTASI (*ELECTION*)

Demokrasi memiliki wujud beragam, tidak statis melainkan dinamis. Robert Dhal menyatakan bahwa demokrasi selalu diciptakan lebih dari sekali dan di banyak tempat. Kondisi yang baik di suatu tempat untuk penciptaan demokrasi belum tentu baik ditempat lain. Ia berasumsi bahwa demokrasi dapat diciptakan dan diciptakan kembali secara independen dimana saja bila kondisinya memungkinkan. Demokrasi lanjut Dhal, punya ragam perspektif. Ada demokrasi langsung (*direct democracy*) yang hanya bisa diimplementasikan pada model pemerintahan negara-kota seperti di Yunani Kuno, dimana rakyat dapat terlihat secara langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Ada pula demokrasi tak langsung, semacam demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang biasanya diterapkan untuk model pemerintahan negara-nasional. Dalam konteks negara tak langsung ini - sebagian kecil penduduk bertanggungjawab untuk mengurus kepentingan rakyat.

Berangkat dari pemahaman Robert Dahl sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi tidak memiliki standar baku dan senantiasa diciptakan dan diciptakan kembali. Dengan begitu, setiap negara atau daerah bebas memaknai dan menciptakan demokrasi sesuai keyakinan dan pemahaman mereka tentang ide dan gagasan dari demokrasi itu sendiri. Di Provinsi Maluku sendiri, demokrasi diterjemahkan dalam bentuk yang paling elementer serta kaya akan filosofi politik. Sebagai provinsi dengan jumlah populasi Islam-Kristen yang hampir berimbang, serta masa lalu orang Maluku yang cukup kelam saat konflik 1999 terjadi, membuat orang Maluku sadar akan pentingnya nilai-nilai persaudaraan yang tercermin dalam semangat *Pela-Gandong*.

Semangat *Pela-Gandong* sendiri terefleksi dari hidup orang basudara (bersaudara) anantara salamsarane (Islam-Kristen). Filosofi inilah yang kemudian membentuk mindset politik orang Maluku akan pentingnya kebersamaan dalam konteks pemerintahan. Sudah menjadi keharusan bagi setiap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Maluku untuk mengusung paket Islam-Kristen atau Kristen-Islam. Kalau Calon Gubernurnya Islam maka Wakilnya harus dari Kristen, sebaliknya, Calon Gubernurnya Kristen maka Wakilnya harus Islam.

Ini hukum besi demokrasi di Maluku. Dalam sejarah kandidasi politik maupun kontestasi politik di Maluku pasca kerusuhan 99, tidak ada kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari satu komunitas agama yang sama. Keduanya harus mencerminkan dua agama besar yang ada di Maluku. Dinamika demokrasi di Maluku ini terbilang unik, dan dipastikan tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia. Kalaupun ada, pasti hitungannya kalkulatif karena ingin menang, bukan karena faktor 'tradisi politik'. Pendekatan demokrasi semacam ini dalam istilah Arendt Lijphart (1999) disebut '*consensus democracy*'. Demokrasi konsensus adalah suatu rezim demokrasi yang lebih menekankan konsensus ketimbang oposisi, lebih merangkul ketimbang memusuhi serta lebih memaksimalkan ukuran koalisi ketimbang hanya sekedar lima puluh persen plus satu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Demokrasi telah berkontribusi banyak terhadap peradaban manusia di abad modern. Demokrasi menjadi titik temu kepentingan dari ragam latar belakang politik dan budaya di seantero dunia, termasuk Indonesia. Meskipun, demokrasi bukanlah sebuah sistem yang ideal, tapi paling tidak demokrasi masih menjadi sistem yang relevan. Mengutip pendapat Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling buruk, tetapi tidak ada yang lebih baik dari itu.

Robert Dhal juga membeberkan fleksibilitas demokrasi hingga mampu beradaptasi dengan tradisi dan budaya di masyarakat. Demokrasi kata Dhal, tidak memiliki standar baku sehingga bisa diproduksi, dan produksi lagi sesuai dengan standar masyarakat setempat. Di Provinsi Maluku sendiri, mekanisme demokrasi pada level Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota beririsan dengan semangat *Pela-Gandong* yang merupakan basis politik moral di setiap perhelatan politik di Maluku.

Sejak pertama kali diselenggarakan Pilgub langsung tahun 2008 - konfigurasi pasangan calon selalu mempertimbangkan aspek keterwakilan agama (Islam-Kristen) sebagai parameter untuk memutuskan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada Pilgub 2008, Pasangan incumbent Karel Albert Rahalu dan Said Assagaff terpilih dengan presentasi suara lebih dari 60 persen suara. Kemudian, pada Pilgub 2013, pasangan Said Assagaff dan Etty Sahubarua keluar sebagai pemenang usai mengalahkan pasangan Abdullah Vanat dan Marthin Jonas Maspaitella di putaran kedua dengan selisih suara hanya lima ribu lebih.

Namun, kepemimpinan Said Assagaff ternyata tak berlanjut ke periode kedua setelah dirinya dikalahkan oleh pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilgub 2018 dengan suara yang cukup signifikan. Terkonsolidasi nya demokrasi di Maluku dengan konfigurasi keterwakilan agama menunjukkan bahwa masyarakat Maluku sukses melampaui politik identitas yang kerap menjadi masalah serius di daerah lain di Indonesia.

B. REKOMENDASI

Meskipun paket konfigurasi pasangan calon dengan pertimbangan keterwakilan agama (Islam Kristen) tidak diatur dalam undang-undang pilkada maupun pemilu, tapi harus diakui proses konsolidasi demokrasi di Maluku *relatively* stabil, bahkan *on the track*. Namun, perlu ada upaya penguatan dengan melembagakan sistem pemilu sehingga pilgub-pilgub kedepan bisa berjalan baik. Harus ada kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat dalam memproteksi sistem pilkada kita di Maluku. Seperti di Aceh, ada kekhususan yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh dalam bentuk partai lokal lewat Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kalau kebijakan pemerintah pusat soal tata kelola berpilkada di Maluku bisa dilakukan seperti di Aceh, maka manajemen pemerintahan dan politik di Maluku akan berkontribusi besar terhadap pembangunan baik di sektor infrastruktur maupun sosial budaya. Maluku akan menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Saya Kalsum Latbual yang tanpa henti mendoakan serta mensupport saya hingga saat ini. Kepada (Alm) Papa Saya Idris Solissa, terimakasih sudah menjadi Papa yang baik hingga akhir hayat. Aku doakan semoga Papa ditempatkan di syurga Allah bersama orang-orang baik.

Kepada keluarga besar saya. Pembimbing Saya Ibu Juni Alfiah. Terimakasih sudah mau membimbing saya dengan sabar dan penuh motivasi. Teman-teman Saya: ada Fredo, Zen, Riri, Pipit, dan semua teman-teman yang sudah memberikan motivasi serta ikut berkontribusi pada penyelesaian jurnal Saya, terimakasih tak terhingga.

Semoga jurnal yang Saya tulis ini dapat bermanfaat bagi Saya pribadi dan masyarakat Maluku dalam memahami konteks kebudayaan kita dalam kaitannya dengan politik praktis di Maluku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT. Sekali lagi terimakasih semuanya.

REFERENSI

Buku :

- Muhammad, Anies. (2013). *Islam dan Demokrasi : Perspektif Wilayah Al-Faqih*. Jakarta : PT. Mizan Publika.
- Muhtadi, Burhanudin. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang : Intrans Publishing.
- Wasesa, Silih Agung. (2011). *Political Branding & Public Relations*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Heryanto, Gun-Gun. (2018). *Problematika Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2013). *Perang Bintang 2014 : Kontelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*. Jakarta : Noura Books (PT Mizan Publika).
- Sugiarto Arya Bima. 2010. *Anti Partai*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. 2008
- Bogdan dan Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya Cipta. 1975
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Plano, Jack C. & Ray Olton. *Kamus Hubungan Internasional (terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin)*. Bandung : Putra A. Bardin
- Newswire. (2013). *Pilgub Maluku: Pasangan Said Assagaff-Zeth Menang di Kabupaten Seram*. Diakses pada 6 Mei 2022, dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20130921/549/1021209/pilgub-maluku-pasangan-said-assagaff-zeth-menang-di-kabupaten-seram>
- Harry Radjabaykolle/ tvOne, Maluku, VIVA.co.id. (2013). *Said-Zeth Resmi Jadi Pemimpin Maluku Terpilih*. Diakses pada 10 Mei 2022, dari <https://www.viva.co.id/arsip/469442-said-zeth-resmi-jadi-pemimpin-maluku-terpilih>
- Ilham/Miftakhul Huda. (2013). *MK Tetapkan Hasil Keseluruhan Perolehan Suara Pilgub Maluku Pasca Pemungutan Suara Ulang*. Diakses pada 6 Mei 2022, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9222>.
- Djayadi Hanan. (2016). *Demokrasi Konsensus*. Diakses pada 10 Mei 2022, dari <https://saifulmujani.com/demokrasi-konsensus/>.